

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan keagamaan Islam menyelenggarakan pendidikan yang berada pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal sudah lama tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dalam PP RI No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.”¹ Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada pasal 3 bahwa “Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas: (a) Pesantren dan (b) Pendidikan diniyah.”²

Lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut tumbuh dan berkembang dimulai dari rumah tangga, rumah kiyai atau tuan guru, surau, mesjid, sampai kepada pendidikan seperti sekarang ini, baik berbentuk sorogan maupun klasikal. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Lembaga pendidikan keagamaan Islam telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan pembangunan sumber daya insani di Indonesia, namun demikian kenyataannya masih ada sebagian birokrat dan pejabat

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang: *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, tth, h.8

² Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 tentang *Pendidikan Keagamaan Islam*, tth, h. 4.

pemerintah khususnya pemerintah daerah memandang lembaga pendidikan Islam seperti madrasah sebagai lembaga pendidikan *second class*, dan terlihat pemerintah daerah kurang perhatian terhadap lembaga pendidikan Islam, baik bantuan dana, ketenagaan dan pembangunan fisik, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini terbukti di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, ada anggaran dana untuk rehab bangunan lembaga pendidikan SD/MI di wilayah kabupaten tersebut, ternyata hanya 2 buah MI yang mendapat dana bantuan rehab, sedangkan SD mendapatkan bantuan jauh lebih banyak (8 buah SD), padahal di daerah tersebut lembaga pendidikan Islam lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum.³

Berdasarkan catatan sejarah peradaban Islam, disebutkan bahwa Islam di kawasan Timur Tengah pada akhir abad VIII Masehi, ketika Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah Baghdad (789–809 M) Islam telah melahirkan suatu peradaban budaya yang jauh lebih maju dari Eropa Barat. Kemajuan yang diperoleh umat Islam saat itu meliputi hasil kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni dan pemikiran yang terbukti telah mewarnai kebudayaan dunia ketika itu. Salah satu kemajuan yang patut dibanggakan adalah adanya pendirian madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang memiliki kontribusi besar dalam melahirkan kaum cendekiawan, negarawan dan administrator, sehingga tidak

³ Informasi dari Drs. H. Barkatullah Amin, M.Ag., Wakil Ketua MDC Kal-Sel periode 2008-2012, 18 Januari 2014.

dapat dipungkiri lagi bahwa pada saat itu banyak kaum intelektual Islam bermunculan.⁴

Sejarah perkembangan dan keberadaan lembaga pendidikan keagamaan Islam baik pada abad pertengahan hingga abad XXI saat ini tidak banyak yang berubah. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam khususnya di Nusantara tumbuh dan berakar dari budaya masyarakat lokal, yang sudah tentu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh dinamika dan perkembangan masyarakat itu sendiri, sehingga tidak dapat disalahkan jika ada sebagian yang berpendapat bahwa madrasah tumbuh dan berkembang dari bawah ke atas (*bottom-up*).

Kenyataan di atas, membuat lembaga pendidikan keagamaan Islam seperti pendidikan diniyah jarang mati atau bubar, namun tetap eksis. Keberadaannya sejalan dengan perkembangan masyarakat setempat, walaupun dinamika terlihat stagnasi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan diniyah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang terpadu. Keduanya saling memberikan manfaat, di satu sisi masyarakat harus memberikan dukungan baik berupa material maupun finansial dan ide-ide agar lembaga pendidikan keagamaan tetap eksis dan perlahan berkembang. Di lain pihak, lembaga pendidikan keagamaan Islam harus mampu memenuhi apa saja kebutuhan masyarakat itu sendiri, baik dalam mencerdaskan masyarakat maupun kajian-kajian keislaman, dan mampu mengimbangi dinamika masyarakat

⁴ M. Habib Husnial Pardi, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, ed. Suwito dan Fauzan, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 209.

setempat.⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik dan buruk, maju dan mundurnya lembaga pendidikan keagamaan Islam sangat tergantung kepada peranserta (partisipasi) dan dinamika masyarakatnya.

Saat ini diperlukan suatu perubahan paradigma dalam pendidikan Islam untuk menghadapi era globalisasi dan era kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Salah satu cita-cita reformasi yang digaungkan ialah untuk membentuk masyarakat madani (*civil society*) atau masyarakat yang berkarakter atau berakhlak mulia. Satu hal yang cukup menggembirakan bagi transformasi pendidikan Islam di zaman orde reformasi adalah hasil amendemen ke-4 pasal 31 UUD 1945 dan diundangkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lahirnya PP. No, 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan dilanjutkan dengan lahir dan berlakunya PMA No. 13 Tahun 2014. Dengan demikian eksistensi lembaga pendidikan keagamaan Islam semakin diakui sebagai bagian dalam sistem pendidikan nasional termasuk di dalamnya lembaga pendidikan diniyah.

Perhatian pemerintah terhadap eksistensi lembaga pendidikan keagamaan secara formal mula-mula diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 1964 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Peraturan ini berisi tentang pengertian, fungsi dan tujuan serta penjenjangan madrasah diniyah.⁶ Peraturan ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1983 tentang Kurikulum Pendidikan Keagamaan, yang mengatur tentang

⁵ M. Habib Husnial Pardi, *Sejarah Sosial ...*, h. 210.

⁶ *Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 1964, tentang Pendidikan ...* h. 3

kurikulum madrasah diniyah (kurikulum pendidikan diniyah),⁷ dan terakhir disempurnakan lagi dengan lahirnya kurikulum madrasah diniyah (kurikulum pendidikan diniyah) tingkat wustha tahun 1994.⁸

Perhatian pemerintah di atas semestinya harus disambut dengan baik dan dimanfaatkan untuk memperkuat eksistensi lembaga pendidikan keagamaan Islam. Menurut Hasbullah “Peran lembaga pendidikan Islam masa depan harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika dan keadilan, sehingga dapat melahirkan generasi yang memiliki nilai-nilai agama dan akhlakul karimah sebagai benteng terakhir dalam arus perubahan besar di masa yang akan datang.”⁹

Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama dan keagamaan dalam menghadapi tantangan masa sekarang dan masa yang akan datang, maka semakin mendorong munculnya tingkat kebutuhan keberagamaan yang lebih tinggi, sehingga sebagian orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum merasakan bahwa pendidikan agama di sekolah umum belum cukup memberikan pengalaman keberagamaan anaknya untuk mengarungi kehidupannya kelak. Oleh karena itu, sebagian orangtua memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan keagamaan khususnya lembaga pendidikan keagamaan Islam, seperti pondok pesantren atau pendidikan diniyah. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini semakin diminati dan dipilih masyarakat, baik untuk menambah pendidikan agama yang diperoleh

⁷ Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1983, *tentang Kurikulum Pendidikan Keagamaan*, h.10.

⁸ Departemen Agama RI, *Kurikulum Madrasah Diniyah Wustho Tahun 1994*, (Jakarta: Dirjen. Kelembagaan Agama Islam, 1995), h. 12.

⁹ Hasbullah, “Memperkuat Peran Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam Masa Depan”, *Fikrah*, Vol. 1, (2002), h. 89.

di sekolah umum maupun untuk memperdalam dan memperluas pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Lahirnya sebuah lembaga pendidikan keagamaan Islam tidak lepas dari peran tokoh-tokoh agama, cendekiawan muslim, dan masyarakat setempat yang mempunyai cita-cita mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dimana belum memiliki lembaga pendidikan. Kehadiran sebuah lembaga pendidikan keagamaan di tengah-tengah masyarakat diterima dan disambut dengan baik oleh warga setempat. Mereka bahu membahu dalam menjaga eksistensi dan keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan keagamaan Islam merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam baik secara sorogan maupun klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada peserta didik yang merasa kurang memperoleh pelajaran agama Islam di sekolahnya. Dalam PMA No. 13 Tahun 2014 Bab I Pasal ayat 1 menyebutkan: “Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.”¹⁰ Keberadaan lembaga pendidikan ini sangat menjamur di masyarakat karena merupakan sebuah kebutuhan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan mempunyai ciri berbeda dan beragam, perbedaannya tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti: latar belakang yayasan dan pendiri lembaganya,

¹⁰ Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 tentang *Pendidikan ...*, h. 2.

sosio-kultural masyarakat setempat, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama, dan kondisi ekonomi masyarakatnya.¹¹

Pada dasarnya pendidikan diniyah atau lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia mempunyai beberapa pola atau tipe penyelenggaraan, secara umum terdapat lima pola atau tipe, yaitu:

1. Madrasah Diniyah *Suplement (Takmiliah)*;
2. Madrasah Diniyah Independen;
3. Madrasah Diniyah Komplementer;
4. Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren; dan
5. Madrasah Diniyah Sistem Paket.¹²

Dari lima pola atau tipe di atas, tidak semua daerah kabupaten atau kota di Indonesia mempunyai lembaga pendidikan keagamaan dengan semua pola penyelenggaraan sebagaimana di atas. Menurut Malik Fadjar, “Pola madrasah diniyah (pendidikan keagamaan Islam) yang paling banyak ditemukan di berbagai daerah adalah madrasah diniyah (pendidikan keagamaan Islam) suplemen dan madrasah diniyah (pendidikan keagamaan) di pondok pesantren.”¹³

Lembaga pendidikan keagamaan Islam dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan diniyah, yang berperan melengkapi dan memperluas wawasan pendidikan agama bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah-sekolah umum (SD, SMP atau SMA) atau madrasah ibtidaiyah (MI), tsanawiyah (MTs) kurikulum negeri (Kurikulum Kemenag. RI) pada pagi sampai siang hari. Selanjutnya pada sore harinya mereka

¹¹ Mal An Abdullah dkk, *Laporan Penelitian, Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Diniyah*, (Jakarta: Puslitbang Penda dan Keagamaan Balitbang Depag, 2003), h. 3.

¹² Agus Maimun, dkk. *Laporan Penelitian, Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah*, (Malang: UIN Malang, 2006), h. 2.

¹³ A Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Cet. I, (Bandung: Mizan, 1998), h. 29.

mengikuti pembelajaran kurikulum diniyah di lembaga pendidikan keagamaan tertentu.

Bertitik tolak dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga pendidikan keagamaan, seperti lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan diniyah agar tetap hidup dan eksis,

... walaupun hingga saat ini lembaga pendidikan keagamaan tersebut masih kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik dalam pemenuhan anggaran belanja maupun bantuan ketenagaan lainnya. Namuni peran lembaga pendidikan ini mendukung posisi yang cukup penting dan strategis dalam sistem pendidikan nasional yang harus dipikirkan bersama.¹⁴

Kalimantan Selatan yang penduduknya mayoritas adalah suku Banjar yang sangat identik beragama Islam, sangat jarang ada orang Banjar yang beragama non Islam. Orang Banjar juga dikenal sangat religius dan fanatik dalam beragama, sehingga tidak heran di wilayah Kalimantan Selatan lembaga pendidikan keagamaan menjamur tumbuh di mana-mana, baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal yang sebagian besar merupakan inisiatif warga atau swadaya masyarakat. Keberadaan lembaga pendidikan agama di Kalimantan Selatan tetap tumbuh dan berkembang seperti halnya lembaga pendidikan Islam lainnya, baik yang berciri khas agama Islam (madrasah kurikulum negeri/kemenag), lembaga pendidikan kurikulum pendidikan diniyah, maupun pondok pesantren.

Berdasarkan data EMIS, lembaga pendidikan agama dan keagamaan Islam (PAKIS) yang ditangani Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016, seluruhnya berjumlah 582 buah tersebar pada

¹⁴ A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan ...*, h. 31.

11 kabupaten dan 2 kota. Secara terperinci untuk masing-masing kabupaten dan kota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 1.1 Sebaran Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Se-Kalimantan Selatan¹⁵

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PAKIS	Siswa	Guru
1	2	3	4	5
01	Banjarmasin	16	716	47
02	Banjarbaru	15	1.606	113
03	Banjar	137	12.047	889
04	Tapin	51	2.282	660
05	Hulu Sungai Selatan	21	2.382	159
06	Hulu Sungai Tengah	48	3.298	278
07	Hulu Sungai Utara	21	1.866	138
08	Balangan	16	723	42
09	Tabalong	12	764	86
10	Tanah Laut	63	4.115	377
11	Tanah Bumbu	13	682	89
12	Pulau Laut (Kota Baru)	49	3.640	267
13	Barito Kuala	120	8.656	546
	Jumlah	582	42.777	3.691

Berdasarkan tabel di atas, pendidikan agama dan keagamaan tersebar ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berjumlah 582 lembaga pendidikan keagamaan. Keberadaan lembaga pendidikan tersebut belum banyak tergarap dalam penelitian ilmiah yang berkontribusi pada kemajuan lembaga tersebut. Bahkan kajian terhadap lembaga pendidikan keagamaan Islam di

¹⁵ Bidang PAKIS, *Pemetaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Prov. Kal-Sel, Data Emis 2016*, (Banjarmasin: Kanwil Kemenag. Provinsi Kalimantan Selatan, 2017).

Kalimantan Selatan terutama lembaga pendidikan keagamaan Islam belum banyak tergarap, sebagaimana pernyataan Azyumandi Azra:

... di Kalimantan Selatan belum ada kajian lembaga-lembaga Islam secara memadai, seperti tempat-tempat lain di Nusantara. Kajian-kajian Islam di Kalimantan Selatan, hanya memusatkan kajian penelitian pada masalah sejarah masuk Islam ke daerah ini, hampir tidak ditemukan pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga Islam dan tradisi ilmiah di kalangan masyarakat muslimnya.¹⁶

Penelitian tentang keislaman di Kalimantan Selatan lebih banyak pada bidang kesejarahan, baik masuknya Islam di Kalimantan Selatan maupun profil tokoh-tokoh ulama terkemuka dan kharismatik. Sementara kajian tentang lembaga pendidikan Islam dirasakan masih kurang. Jika ada, biasanya penelitian tersebut banyak dilakukan pada sejarah lembaga pendidikan Islam, seperti pondok pesantren tertua, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berupa penelitian deskriptif, sehingga masih sangat kurang pada penelitian yang berorientasi pada pembuatan produk yang bertujuan untuk kemajuan lembaga pendidikan keagamaan Islam khususnya pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan.

Keberadaan dan perkembangan lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut, khususnya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan diniyah tidak luput dari berbagai permasalahan yang tengah dihadapi, seperti penyusunan dan pelaksanaan kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, penggunaan metode pembelajaran, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen, kepemimpinan dan supervisi, dan sumber keuangan.

¹⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 251.

Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren¹⁷, termasuk pendidikan diniyah. Kitab kuning sebagai materi kurikulum utama dalam proses pembelajaran pada lembaga pendidikan diniyah di pondok pesantren sering disebut *al-kutub al-qadimah*, *al-kutub al-shafra'* atau “kitab kuning” karena biasanya kitab-kitab itu dicetak di atas kertas berwarna kuning, sesuai dengan kertas yang tersedia pada waktu itu. Ciri lain dari literatur yang dipergunakan di pesantren itu ialah beraksara Arab gundul (huruf Arab tanpa *harakat* dan *syakal*). *Al-kutub al-qadimah* itu jumlahnya sangat banyak yang dimiliki para kyai. “Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren (lembaga pendidikan keagamaan) di Indonesia adalah kitab-kitab yang umumnya karya ulama-ulama madzhab Syafi'i (*Syafi'iyyah*). Judul kitab-kitab kuning yang beredar di kalangan kyai di pesantren-pesantren Jawa dan Madura jumlahnya mencapai 900 judul.”¹⁸

Kurikulum di lembaga pendidikan keagamaan Islam menggunakan kitab-kitab klasik sebagai kurikulum diberikan kepada santri berdasarkan urutan atau *sequence* yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Ustadz dan ustadzah dalam menyampaikan materi bahan ajar hanya tinggal mengikuti urutan yang ada di dalam kitab tersebut, sedangkan *scope*-nya atau ruang lingkupnya disesuaikan dengan waktu dan tingkatan santrinya.¹⁹

¹⁷ Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 tentang *Pendidikan ...*, h. 3.

¹⁸Departemen Agama, *Pola Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 17.

¹⁹ Inna Muthamainnah, *Designing the Curriculum of Kitab Kuning (Arabic Script) at Pondok Pesantren Salafiyah in South Kalimantan*, (Disertation), (Malaysia: Universiti Utara Malaysia, 2014), h. 307.

Kitab-kitab kuning yang dipakai pada lembaga pendidikan keagamaan di pondok pesantren jika diklasifikasikan menurut materi (disiplin/cabang ilmu) dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) disiplin, yaitu:

1. Bidang Aqidah/Tauhid, menggunakan Kitab *Aqidul Awam*
2. Bidang Tajwid (Baca al-Qur'an), Menggunakan Kitab *Syif ul Jinan*
3. Bidang Akhlaq/Tasawuf, Menggunakan Kitab *Akhlaq li al-Banin*
4. Bidang Bahasa Arab (*Mutammimah al Jurumiyah, Amtsilah at Tashrifiyah*)
5. Bidang Fiqih (Kitab *Mabdiul Fiqhiyyah, Fiqh al Wadhhi*)
6. Ushul Fiqih (Kitab *Waraqat*)
7. Bidang Tafsir dan Bidang Ulumul Qur'an (Kitab *Tafsir Jalalain*)
8. Bidang Hadits dan Bidang Ulumul Hadits (Kitab *Mutun an Nawawiyah*)
9. Bidang Tarikh (Kitab *Nurul Yaqin*).²⁰

Kitab-kitab tersebut kebanyakan digunakan pada lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan diniyah, dan sangat terbuka kemungkinan masing-masing tingkat kelas dan jenjang pendidikan menggunakan kitab-kitab yang berbeda atau bertingkat sesuai dengan kelas dan jenjang pendidikan di lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan keagamaan umumnya masih mengadopsi pengertian kurikulum secara sempit atau tradisional, yakni berupa sejumlah mata pelajaran agama Islam yang bersifat subjek akademis. Beberapa mata pelajaran tersebut merupakan isi kurikulum yang diberikan kepada para santri sesuai dengan urutan pada kitab atau buku tertentu. Oleh karena itu, sangat jarang ada ustadz/ustadzah yang mengorganisasikan bahan pelajaran berdasarkan kebutuhan santri. Padahal pada lembaga pendidikan keagamaan dalam pendidikan era modern sekarang ini perlu memiliki kurikulum yang terorganisir dan tertulis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan keagamaan. Hal tersebut dapat memudahkan untuk

²⁰Departemen Agama, *Pola Penyelenggaraan Madrasah*, h. 17-30.

mengarahkan tercapainya tujuan kurikulum di lembaga pendidikan keagamaan itu sendiri. Sesuai dengan tujuan keberadaan lembaga pendidikan keagamaan, yaitu: dari masyarakat oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, maka sangat tepat untuk mengembangkan kurikulum diniyah yang berasal dari masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Untuk memberdayakan lembaga pendidikan keagamaan, menurut Emroni dkk. "...adalah dengan melibatkan pihak pondok dan sejumlah stakehoders, dan masyarakat sekitar,"²¹ sehingga pengembangan kurikulum diniyah dengan pendekatan *grassroots* (akar rumput) dianggap alternatif yang cukup tepat.

Berdasarkan hasil penjajakan awal²² pada pondok pesantren yang berada di Banjarmasin yang menyelenggarakan pendidikan diniyah antara lain seperti pondok pesantren (PP) al Istiqamah Banjarmasin ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan penyusunan kurikulum pendidikan diniyah umumnya menggunakan atau menerapkan *literature* atau kitab-kitab klasik tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yayasan atau pendiri lembaga pendidikan keagamaan sebagai isi kurikulum. Penetapan kitab-kitab yang dijadikan sebagai isi (*content*) kurikulum adalah berdasarkan rapat guru dengan pertimbangan guru-guru yang tersedia. Kitab-kitab tersebut diberikan kepada santri dengan ruang lingkup (*scope*) dan urutan penyajiannya (*sequence*), seperti yang ada dalam kitab tersebut, dan disesuaikan dengan tingkatan santri di lembaga pendidikan yang

²¹Emroni, *et al.* eds, "Perberdayaan Pondok Pesantren Sullamul 'Ulum Syekh Arsyad al-Banjari Dalam Pagar Martapura Kabupaten Banjar (Penelitian Partisipatif)", Tashwir: Vol. 1, (2013), h. 56

²²Wawancara dengan Zainal Ilmi, Kepala MA PP. Al-Itiqamah Banjarmasin, dan M.. Jamil, Ustadz PP. al-Itiqamah Banjarmasin, 9 Februari 2015.

bersangkutan. Selain itu, pola penyusunan kurikulum yang berdasarkan kajian atau hasil studi banding ke beberapa lembaga pendidikan keagamaan yang dianggap baik, kemudian mereka (ustadz/ustadzah dan pengelola) meniru dan mengadopsi kurikulum tersebut, selanjutnya menerapkannya di lembaga pendidikannya, sehingga isi (*content*) kurikulum yang ada kurang relevan dengan visi dan misi madrasah itu sendiri, kebutuhan santri, harapan orangtua, dan masyarakat sebagai *the user* dari *output*-nya.

Adapun penggunaan metode pembelajaran dan manajemen kepemimpinan sering juga ditemukan permasalahan. Penggunaan metode pembelajaran di lembaga pendidikan keagamaan Islam yang sering ditemukan di lapangan adalah penggunaan metode pembelajaran yang konvensional (komunikasi satu arah) dan cenderung konservatif yang kadang-kadang kurang memperhatikan minat dan aktivitas santri. Sedangkan manajemen pendidikannya dilaksanakan dengan pengelolaan tradisional (*one hand management*), kepemimpinan sering berdasarkan turun-temurun dan senioritas, bukan berdasarkan kompetensi dan kapabilitas seseorang.

Permasalahan lain, bidang keuangan yang sudah dipastikan lembaga pendidikan yang dikelola secara tradisional, menghadapi kendala keuangan yang hanya mengandalkan donator yang ada dan terbatas, dan dari orangtua santri, terlihat belum dikelola secara profesional dengan membuat jaringan (*network*) dalam mencari sumber dana dari berbagai pihak.

Menurut Muhran Juhri, Citra madrasah (lembaga pendidikan keagamaan Islam) yang kurang baik disebabkan beberapa hal, seperti sebagian madrasah (lembaga pendidikan keagamaan Islam) dikelola dengan manajemen dengan manajemen seadanya, banyak pengajar (pendidik) yang belum memenuhi

standar minimal, sarana dan prasarana yang sangat terbatas, dan rendahnya honor bagi guru dan karyawan.²³

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, penulis mencoba untuk mengkaji secara ilmiah permasalahan tersebut terutama bidang kurikulum, karena kajian ini jarang dilakukan, khususnya pada lembaga pendidikan keagamaan Islam, terutama lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, kurikulum pendidikan diniyah berlangsung tidak banyak mengalami perubahan bahkan cenderung *stagnant*.

Berdasarkan tinjauan teori bahwa kurikulum merupakan salah satu unsur terselenggaranya proses pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mujib, dkk, bahwa unsur/komponen pendidikan adalah:

1. Komponen pendidik (guru)
2. Komponen peserta didik (siswa)
3. Komponen kurikulum
4. Komponen sarana (fasilitas)
5. Komponen Lingkungan²⁴

Semua komponen tersebut harus ada dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, unsur/bagian yang saling berkaitan dan menopang satu unsur/bagian dengan unsur lainnya dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, sehingga satu bagian dengan unsur lainnya tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, komponen-komponen tersebut harus terintegrasi dalam satu sistem pendidikan.

²³ Muhran Juhri, "Meningkatkan Citra Madrasah Swasta", Fikrah Vol. 1, (Banjarmasin: (2002), h. 91.

²⁴ Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), 2006, h. 87-158

Sebuah kurikulum juga mengandung beberapa unsur atau komponen yang satu dengan lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam mekanisme suatu sistem. Komponen-komponen tersebut menurut John F. Kerr yang dikutip oleh Soetopo dan Soemanto terdiri dari 4 komponen, yaitu: *objectives* (tujuan), *knowledges* (pengetahuan/isi kurikulum), *school learning experiences* (pengalaman belajar di sekolah) atau proses pembelajaran, dan *evaluation* (evaluasi)²⁵. Bila ingin mengkaji sebuah kurikulum pendidikan, maka tidak lepas dari mengkaji keempat komponen tersebut.

Banyak model yang ditawarkan oleh para pakar kurikulum, sekurang-kurangnya ada sembilan model pengembangan kurikulum, yaitu:

1. Model *Administrative (line Staff) Model*
2. Model *Grass-Roots*
3. Model *Demonstrative*
4. Model *Roger's Interpersonal Relations*
5. Model Taba (Hilda Taba) disebut juga *inverted model*.
6. Model *Beauchamp's System*
7. *Miller dan Sellar Model*
8. *Gagne (Transmisi) Model*
9. *Peter F. Oliva Model*²⁶

Model-model kurikulum di atas, masing-masing mempunyai prosedur dan mekanisme tersendiri dalam mendesain komponen-komponen kurikulum yang bertujuan untuk menentukan keberhasilan sebuah proses pendidikan. Mendesain kurikulum bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan mendesain sangat memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan dapat mengakomodir tuntutan dan perubahan zaman, serta

²⁵ John F. Ker, *Changing the Curriculum*, dalam Hendyat Soetopo & Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 2.

²⁶ Syaifuddin Sabda, *Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis*, (Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2016), h. 225-244.

kebutuhan dan harapan masyarakat. Mendesain kurikulum berarti menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan.

Berdasarkan kajian penulis dari teori-teori yang ada, desain kurikulum yang dianggap sesuai dengan karakteristik dan visi lembaga pendidikan diniyah tingkat wustha, dan yang relevan dalam pengembangan kurikulumnya adalah dengan menggunakan pendekatan *grassroots* (akar rumput). Alasannya adalah bahwa lembaga pendidikan keagamaan Islam lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga dianggap tepat bila desain kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat, selanjutnya alumninya (*output*) dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan masyarakat sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Adapun alasan memilih lembaga pendidikan tingkat wustha (tsanawiyah) yang menjadi sasaran penelitian adalah:

1. Peserta didik yang berada pada tingkat wustha ini berusia 12-16 tahun, dengan rentang usia demikian mereka dapat dikatakan fase remaja. Pada fase ini adalah periode penemuan diri dan kepekaan rasa sosial. Dalam masa ini kepribadian harus dikembangkan sepenuhnya dan harus sadar akan keharusan-keharusan kenyataan sosial.²⁷ Kondisi tersebut seharusnya mendapat perhatian pendidikan yang lebih intens dari berbagai komponen pendidik khususnya ustadz/ustadzah di lembaga pendidikan keagamaan Islam.
2. Berdasarkan sudut pandang fiqih, usia tersebut sudah *baligh* dan sudah mendapat *taklifi* atau dibebankan kewajiban menjalankan ajaran agama.

²⁷ Sumadi Suryobroto, *Psikologi Perkembangan* (Edisi IV), (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), h. 42

3. Fakta di lapangan, lembaga pendidikan keagamaan tingkat wustha lebih banyak ditemukan di beberapa pondok pesantren di Kalimantan Selatan dibandingkan dengan tingkat *awaliyah* atau *'ulya*.

Pengembangan kurikulum dengan pendekatan *grassroots* adalah dimana guru-guru sebagai implementator, selanjutnya menyebar pada area yang lebih luas lagi, makanya pendekatan ini dinamakan juga pengembangan kurikulum dari bawah ke atas (*bottom-up*). Pendekatan ini mengikuti langkah-langkah model Taba (*inverted model*).²⁸ Oleh karena sifatnya yang demikian, pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam penyempurnaan kurikulum (*curriculum improvement*). Sesuai dengan keberadaan kurikulum pendidikan diniyah yang berjalan stagnan, maka sangat tepat kurikulum tersebut di-*reorganize* atau di-*redesign* dengan pendekatan *grassroots*. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum di sini adalah bermakna *curriculum improvement*.

Me-*redesign* kurikulum pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan dengan pendekatan *grassroots*, tidak lepas dari mengembangkan empat komponen yang terdapat dalam kurikulum, seperti komponen tujuan (dari tujuan institusional sampai pada tujuan pembelajaran (*learning objective*)), komponen isi/materi kurikulum (*scope* dan *sequence*-nya), komponen proses belajar mengajar dan komponen evaluasi. Semua komponen tersebut dikaji dan diupayakan untuk melakukan *redesign* dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan diniyah sesuai dengan harapan masyarakat (*the user*).

²⁸ Hilda Taba, *Curriculum Development; Theory and Practice*, (San Francisco: Brace & World, Inc., 1962), h. 12.

Berdasarkan hasil wawancara²⁹ dengan kepala lembaga pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren al-Istiqamah, terungkap sebagian besar guru dan pengelola lembaga pendidikan tingkat wustha melaksanakan kurikulum yang ada tanpa ada melakukan revisi kurikulum selama bertahun-tahun. Kurikulum (kitab-kitab klasik/kuning) yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dewan guru dengan memperhatikan sumberdaya manusia yang ada (gurunya), pada umumnya kurang memperhatikan kesesuaian kurikulum baik terhadap peserta didik maupun harapan masyarakat. Kalaupun ada masukan dari masyarakat tentang isi kurikulum dilakukan secara insidental, dalam artian tidak permanen dalam kurikulum yang tertulis dalam bentuk dokumen, sehingga untuk selanjutnya kembali lagi kepada kitab yang ada.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut penulis berupaya menyumbangkan pemikiran untuk merancang kembali (*redesign*) kurikulum pendidikan diniyah yang ada khususnya pada tingkat wustha di Kalimantan Selatan, agar lembaga pendidikan tersebut memiliki kurikulum yang teroganisir berdasarkan komponen kurikulum tersebut, sehingga kurikulum yang diberikan kepada santri sesuai dengan karakteristiknya, dan harapan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengembangan desain kurikulum pendidikan diniyah di Kalimantan Selatan yang relevan dengan harapan masyarakat?” Fokus

²⁹ Wawancara dengan Zainal Ilmi, Kepala MA PP. Al-Itiqamah Banjarmasin, 9 Februari 2015.

utama penelitian tersebut dijabarkan dalam fokus penelitian yang lebih khusus, yaitu:

1. Bagaimana kurikulum pendidikan diniyah yang berlaku pada tingkat wustha (tsnawiyah) di Kalimantan Selatan? Meliputi: visi-misi, isi kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum.
2. Bagaimana pandangan guru-guru (ustadz) dan *stakeholders* lainnya terhadap kurikulum diniyah yang ada?
3. Bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan diniyah yang relevan dengan keinginan, harapan guru dan *stakeholders* lainnya?
 - a. Bagaimana desain standar kompetensi lulusan (SKL) pada kurikulum pendidikan diniyah berdasarkan pendekatan *grassroots*?
 - b. Bagaimana desain standar isi kurikulum diniyah?
 - c. Bagaimana desain standar proses pembelajaran kurikulum diniyah?
 - d. Bagaimana desain standar penilaian kurikulum diniyah?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah desain kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan, dengan pendekatan *grassroots* yang relevan dan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kurikulum pendidikan diniyah yang berlaku pada tingkat wustha di Kalimantan Selatan.

2. Mendeskripsikan tentang pandangan guru dan *stakeholders* lainnya terhadap kurikulum diniyah di tingkat wustha di Kalimantan Selatan.
3. Menghasilkan desain kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha yang relevan dengan keinginan, harapan, dan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan yang meliputi desain tujuan kurikulum (SKL), standar isi kurikulum diniyah, standar proses belajar-mengajar (PBM), dan standar evaluasi kurikulum diniyah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah desain kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha di Kalimantan Selatan. Desain kurikulum yang hendak dikembangkan berdasarkan landasan konseptual yang relevan serta kenyataan empiris di lapangan terutama keinginan dan harapan masyarakat serta telah tervalisasi oleh ahli, sehingga memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dalam kajian bidang ilmu kurikulum dan pembelajaran khususnya pada madrasah tingkat wustha.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekurang-kurangnya dalil tentang pengembangan kurikulum diniyah yang merupakan bagian dari disiplin pendidikan Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Selain itu, diharapkan dapat menemukan desain kurikulum pendidikan diniyah yang merupakan bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan Islam, sehingga dapat memperkaya ilmu pendidikan Islam sebagai sebuah disiplin ilmu.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu desain pengembangan kurikulum pada madrasah pada umumnya dan juga sebagai masukan bagi Kementerian Agama RI untuk melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, khususnya kurikulum pendidikan diiyah, sehingga *output* dan *outcome*-nya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan akhlak atau karakter bangsa dan kemajuan negara.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini dan untuk menghindari salah tafsir (*misinterpretation*) terhadap istilah yang digunakan dalam karya ilmiah ini, maka ada beberapa definisi operasional perlu dikemukakan, yaitu:

1. Pengembangan

Pengembangan berasal dari kata *development* yang berarti “*the act of developing or process of being developed.*”³⁰ Sementara berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengembangan berarti “proses, cara, perbuatan mengembangkan, atau pengembangan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.”³¹

Pengembangan kurikulum konteks penelitian ini adalah kegiatan yang mencakup: penyusunan draf kurikulum (SKL, standar isi, standar proses, dan

³⁰ Randolph Quirk cs, *Longman Dictionary of Contemporary English* (New Edition), (London: Richard Clay Ltd. Bungay, Suffolk, 1987), h. 260.

³¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ketiga), (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 538

standar evaluasi), dilanjutkan dengan validasi oleh para ahli dan praktisi pendidikan. Kemudian hasil validasi didiskusikan dan disempurnakan menjadi desain kurikulum. Konsep pengembangan yang digunakan di sini adalah konsep *curriculum improvement*.

2. Kurikulum

Kurikulum adalah program pendidikan atau program belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan.³² Kurikulum yang dimaksud di sini adalah kurikulum yang terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen materi/isi, komponen PBM dan komponen evaluasi. Maksud pengertian kurikulum dalam penelitian ini, adalah menyangkut perumusan tentang standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi kurikulum, standar proses pembelajaran, dan standar evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada pengembangan kurikulum pendidikan diniyah sesuai dengan empat standar pendidikan tersebut.

3. Kurikulum pendidikan diniyah

Kurikulum pendidikan agama (diniyah) adalah semua pengetahuan, aktivitas (kegiatan-kegiatan), dan juga pengalaman-pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada peserta didik (santri) dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama.³³ Sedangkan yang dimaksud kurikulum pendidikan diniyah dalam penelitian ini adalah meliputi: (1) standar kompetensi lulusan (SKL), (2) standar isi kurikulum, (3) standar proses pembelajaran, dan (4) standar evaluasi.

³² Hafni Ladji, *Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 24

³³ Zuhairini, dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama* (Surabaya: Usana Offset Printing, 1983), h. 59.

4. Tingkat Wustha

Tingkat wustha atau disebut juga *muthawassitah*, yang pada lembaga pendidikan tertentu sering digunakan kata *tsanawiyah*, seperti madrasah tsanawiyah, yang berarti setara dengan tingkat wustha atau *mustawassitah* atau sederajat lainnya yang masa belajarnya adalah selama 3 tahun.

5. Pendekatan *Grassroots*

Pendekatan *grassroots* dimaksud di sini ialah pengembangan kurikulum yang dimulai dari guru-guru sebagai inisiator dan konseptor. Pendekatan ini disebut juga pendekatan akar rumput yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum dengan melibatkan ustadz dan ustadzah yang berorientasi pada kebutuhan, karakteristik santri dan harapan masyarakat.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah merancang kembali (*redesign*) kurikulum pendidikan diniyah pada tingkat wustha (*tsanawiyah*) berdasarkan harapan *stakeholders* di Kalimantan Selatan dengan pendekatan *grassroots* (akar rumput), yang meliputi: perumusan standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi/materi kurikulum, standar pengalaman/proses pembelajaran dan penyusunan teknik dan prosedur evaluasi kurikulum, dengan jenis penelitian R & D (*research and development*). Dengan demikian diharapkan akan terbentuk suatu desain kurikulum tertulis (desain hipotetik) kurikulum pendidikan diniyah tingkat wustha (*tsanawiyah*) di Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar pertimbangan dalam penelitian ini ada beberapa hasil penelitian terdahulu dan literature yang dapat mendukung kajian ilmiah ini layak untuk dilakukan sebuah penelitian, hasil penelitian tersebut adalah:

1. Agus Maimun, dkk, Tahun 2006 dengan judul: *Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan)*³⁴, hasil temuan/simpulan sebagai berikut: (1) Sebagian besar kurikulum madrasah diniyah mengacu pada kurikulum pondok pesantren afeliasi dan juga kurikulum Departemen Agama dengan melakukan modifikasi seperlunya. Modifikasi kurikulum ini dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat dan perkembangan serta kebutuhan siswa; (2) Ada tiga masalah utama yang sekarang dihadapi madrasah diniyah, yaitu: kekurangan dana, tingkat ekonomi dan pendidikan orang tua siswa relatif rendah, dan adanya kecenderungan menjadi "anak tiri" di masyarakat. "Pusat kekuasaan" di madrasah diniyah berada pada kepala madrasah atau *kh dimul madrasah*, bukan pada kyai. Meskipun hampir semua madrasah diniyah telah mempunyai struktur kepengurusan yang lengkap, bahkan dari struktur itu juga telah dijabarkan tugas masing-masing pengurus melalui *job description* secara jelas dan operasional, tetapi banyak dari pengurus yang kurang fungsional, sehingga seringkali persoalan madrasah lebih bertumpu pada *khadimul madrasah*; (3) Pada pengajaran secara klasikal, para guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan latihan, sedang

³⁴ Agus Maimun, dkk, *Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006)

untuk pengajaran individual menggunakan sorongan dalam bentuk hafalan. Para guru dalam setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran, selalu mengajak siswa untuk doa bersama, doa memulai pembelajaran dengan membaca surat *al-Fatihah* dan doa mencari ilmu, sedang doa mengakhiri pembelajaran dengan membaca *surah al-Asyr* dan *Syi'iran*. dan (4) Semua madrasah diniyah telah melaksanakan evaluasi pembelajaran, meskipun tidak tertib di sekolah/madrasah formal pada umumnya. Ini menunjukkan bahwa, para guru madrasah diniyah sadar akan pentingnya evaluasi pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan atau kompetensi yang telah ditentukan, walaupun dengan prestasi yang berbeda-beda antar masing-masing individu. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan di madrasah diniyah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: evaluasi mingguan, evaluasi semesteran dan evaluasi tahunan (*Imtih n*).

2. Husnul Yaqin, dkk, Tahun 2011, dengan judul: *Profil Madrasah Diniyah di Kota Banjarmasin*,³⁵ hasil temuannya adalah: Lembaga ini merupakan suplemen bagi pendidikan anak-anak sekolah dalam bidang pendidikan agama. Walaupun berfungsi sebagai suplemen, lembaga ini tetap mempunyai visi dan misi yang jelas dan sejalan dengan tujuan didirikannya madrasah diniyah itu sendiri, yakni memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar pendidikan umum. Kurikulum yang digunakan pada madrasah diniyah di Kota Banjarmasin pada umumnya dibuat oleh pihak madrasah itu sendiri, dan didasarkan kepada

³⁵ Husnul Yaqin, dkk, *Profil Madrasah Diniyah di Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari, 2011)

muatan kurikulum pesantren yang menjadi pengalaman pendiri atau pimpinan.

3. Penelitian Towaf Tahun 1996 yang mengungkapkan adanya kelemahan-kelemahan pendidikan agama Islam di madrasah, antara lain: (1) pendekatan masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama Islam menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian; (2) Kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancang sebenarnya lebih menawarkan minim informasi, dan guru PAI seringkali terpaksa padanya sehingga semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar yang bervariasi kurang tumbuh.
4. Syaifuddin Sabda, dkk, Tahun 2004, Penelitian beliau tentang: *Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*,³⁶ hasil temuannya adalah bahwa perkembangan awal pondok pesantren tidak mengenal istilah kurikulum, pembelajaran berbentuk pengajian umum. Perkembangan selanjutnya kurikulum pondok pesantren berorientasi pada penguasaan disiplin ilmu (kurikulum subjek akademis), yaitu disiplin ilmu agama Islam. Isi kurikulumnya tidak hanya berupa mata pelajaran agama Islam tetapi memasukkan materi pelajaran umum. Beberapa aaktor yang memepengaruhi dinamika kurikulum tersebut adalah; (1) faktor perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang bergeser dari kebutuhan akan hasil pendidikan yang menguasai ilmu agama Islam menjadi membutuhkan hasil pendidikan

³⁶ Syaifuddin Sabda, dkk, *Dinamika Kurikulum Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari, 2004)

yang dapat melanjutkan ke lembaga pendidikan umum dan atau bekerja kantoran, sehingga menyebabkan pesantren harus menyesuaikan keurikulumnya, (2) faktor kebijakan pimpinan pondok pesantren

5. Salamah, dkk, Tahun 2011, *Implementasi Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Madrasah Tsanawiyah di Banjarmasin*, hasil temuannya menyimpulkan bahwa dengan model kurikulum holistik dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan adanya peningkatan aktivitas siswa. Langkah-langkah implementasi model kurikulum holistik tersebut, yaitu: (1) melakukan analisis kondisi siswa (latar belakang pengetahuan, motivasi, kebiasaan belajar dan lain-lain), (2) memadukan sub-sub materi dalam rumpun mata pelajaran PAI (Fiqih, Akidah akhlak, SKI, dan al-Quran Hadis), (3) menghubungkan materi yang disampaikan dengan pengalaman nyata siswa, (4) memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, (5) mempraktekkan membaca al-Quran/dzikir di kelas, dan (6) memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pengalaman batinnya dalam kaitannya dengan pengalaman ajaran agama (refleksi diri), sementara rekomendasi yang disampaikan, salah satunya adalah kebijakan yang menetapkan kurikulum PAI di madrasah terdiri dari empat mata pelajaran yang berdiri sendiri handaknya harus dipahami para pejabat dan pendidikan terkait bahwa model kurikulum tersebut memiliki misi agar peserta didik bukan sekedar dapat melaksanakan ajaran Islam, melainkan juga adalah dalam ilmu agama Islam, dengan demikian maka rancangan desain dan implementasinya harus disesuaikan.

6. Inna Muthmainnah³⁷, Tahun 2014, disertasi yang berjudul: *Designing the Curriculum of Kitab Kuning (Arabic Script) At Pondok Pesantren Salfiyah in South Kalimantan*. Diantara hasil temuannya antara lain: (1) di Pondok Pesantren tidak ditemukan kurikulum yang tertulis yang berisi tujuan pembelajaran, isi materi pelajaran, metode pembelajaran, dan asesmen dan penilaian. Di dalam profil PP, mereka memiliki visi dan misi yang dimaksud sebagai tujuan pendidikan. (2) Isi materi yang diajarkan bertahun-tahun dan ditulis dalam kitab kuning. (3) Secara umum metode pembelajaran adalah ceramah (*lecture*), yaitu guru (*ustadz*) membacakan Kitab Kuning, menerjemahkan, dan menjelaskannya. Sementara siswa (*santri*) membuat catatan, menghafal dan mendemonstrasikan isi materi pelajaran (*content of subject*). (4) Metode penilaian, siswa diminta untuk membacakan kitab kuning, menerjemahkan dan terakhir menjelaskannya.

Permasalahan yang ditemukan di PP yang dianggap sebagai hal mendesak selaligus sebagai tantangan dalam pembinaan kurikulum (*Improving the curriculum*) adalah menekankan pada penguasai isi/materi pelajaran (*content/subject matters*), sehingga penguasaan siswa terhadap materi kitab kitab kuning sangat baik, namun mereka kurang mampu untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, kurangnya sarana dan prasaran pendidikan di PP, juga kualifikasi pendidikan guru-gurunya yang mengajar sebagian besar belum sarjana dan tidak ada supervisi atau pengawas yang melakukan pembinaan pada guru-guru.

³⁷ Inna Muthmainnah, *Designing the Curriculum of Kitab Kuning...*, h. 306-311

Berdasarkan penelitian di atas, nampak sudah banyak kajian yang mengangkat pendidikan keagamaan (diniyah), hal ini dapat memberikan pencerahan kepada penulis untuk mengangkat penelitian di lembaga pendidikan diniyah dalam aspek kurikulum diniyah yang belum tergarap secara komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi menjadi tujuh bab yang terdiri dari:

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian pustaka tentang Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Pendekatan *Grassroots*, yang terdiri dari subjudul: Pengembangan Kurikulum di Lembaga Pendidikan Islam, Perkembangan Madrasah dan Kurikulum Diniyah di Indonesia, Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah, Pengembangan Kurikulum Diniyah Pendekatan *Grassroots*, dan Desain Kurikulum Pendidikan Diniyah Pendekatan *Grassroots*.

Bab III berisi Metode Penelitian yang terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik/Metode Pengumpulan Data, Prosedur dan Langkah Penelitian, dan Analisis Data.

Bab IV Studi Lapangan Pembentukan Desain Pengembangan Kurikulum Diniyah Pendekatan *Grassroots*, yang terdiri dari subjudul: Visi - Misi, dan Tujuan Madrasah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan, Pelaksanaan

Kurikulum Diniyah di Lembaga Pesantren, dan Pandangan Pimpinan Pondok, Guru-guru dan *Stakeholders* Lainnya terhadap Kurikulum Pendidikan Diniyah yang Berlaku.

Bab V Pembahasan Pembentukan Desain Kurikulum Pendidikan Diniyah Pendekatan *Grassroots*, yang berisi: Dasar Pembentukan Desain Pengembangan Kurikulum Diniyah, Rancangan Desain Pengembangan Kurikulum Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan, dan Draf Desain Pengembangan Kurikulum Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan Pendekatan *Grassroots* (Empat Standar Pendidikan di Lembaga Pendidikan Diniyah Tingkat Wustha)

Bab VI Laporan Hasil Validasi, Revisi Desain, dan Desain Kurikulum Diniyah Tingkat Wustha di Kalimantan Selatan yang berisi: Diskusi Hasil Validasi Empat Standar Pendidikan Kurikulum Diniyah, Diskusi Hasil Validasi Penjabaran KI, KD, *Scope* dan *Sequence* Mata Pelajaran Madin (Bagian Standar Isi Kurikulum Diniyah, dan Desain Kurikulum Diniyah Tingkat Wustha Kalimantan Selatan.

Bab VII Penutup yang berisi Simpulan dan Rekomendasi.

